

BAB I

PENDAHULUAN

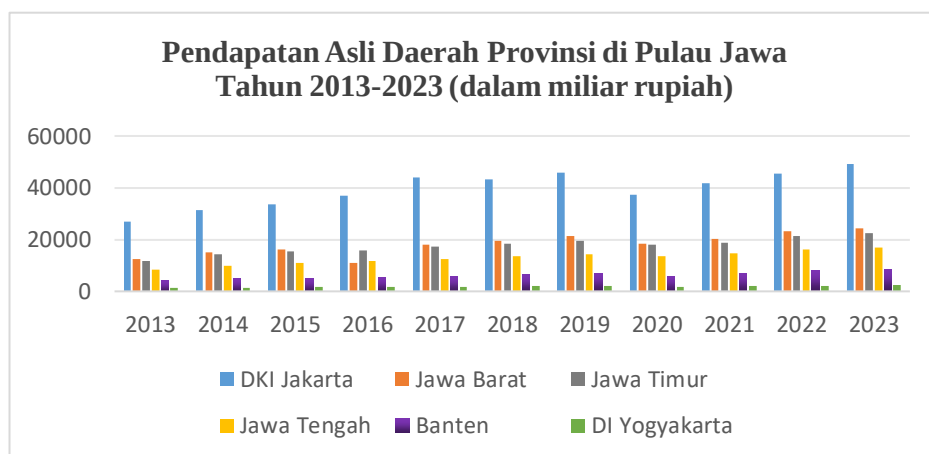
1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara terluas ke-15 sekaligus negara dengan kepulauan terbesar yang menduduki peringkat ke-6 negara dengan pulau terbanyak di dunia. Wilayah Indonesia yang terlalu luas tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien agar dapat terciptanya pemerataan pembangunan daerah. Dalam proses pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan hak dan kewajiban otonomi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, dimana dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan supaya terjadi peningkatan dan pemerataan, khususnya dalam hal pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, pelayanan publik, serta daya saing daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat dengan leluasa memaksimalkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga penting bagi setiap daerah memaksimalkan penerimaan atau pendapatan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan daerah (Lubis & Fitriani, 2018).

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar, secara geografis provinsi ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Banten memiliki jalur laut yang strategis yaitu selat sunda yang menjadi jalur transportasi laut internasional. Pada bagian barat Provinsi Banten terdapat Pelabuhan penyebrangan Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Sementara pada bagian timur terdapat Bandara Internasional Soekarno Hatta yang merupakan salah satu infrastruktur vital penggerak ekonomi nasional.

Sedangkan pada sektor industri, Provinsi Banten memiliki 17 kawasan industri yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pada sektor perkebunan dan pertanian Banten menghasilkan padi, karet, cengkeh, melinjo, palawija, dan buah-buahan. Perikanan laut juga sangat signifikan karena 75% daerah Banten dikelilingi oleh laut. Selain itu, Banten juga memiliki aset pariwisata seperti Pantai Anyer, Pantai Tanjung Lesung dan Pantai Carita yang indah, Taman Nasional Ujung Kulon, dan peninggalan sejarah serta kebudayaan. Besarnya kekayaan alam yang dimiliki Banten seharusnya bisa mendobrak pendapatan asli daerah. Namun, ternyata pada tahun 2023, DJPK Kemenkeu mencatat bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Banten merupakan yang terendah kedua di Pulau Jawa (DJPK Kemenkeu, 2023).



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah penulis, 2024)

Gambar 1.1

**Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2013-2023**

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa Provinsi Banten masuk ke dalam peringkat kedua yaitu provinsi dengan pendapatan asli daerah terendah di Pulau Jawa. Provinsi Banten dengan letak geografisnya yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, seharusnya Banten dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pendapatan daerahnya. Tetapi pada kenyataannya, Banten masuk ke dalam daerah dengan pendapatan asli daerah terendah kedua di Pulau Jawa.

Berikut ini merupakan perkembangan pendapatan asli daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2023:



Sumber: DJPK Kemenkeu dan Pemprov Banten (diolah penulis, 2024)

Gambar 1.2

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2023

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Banten dalam kurun waktu 10 tahun, sejak tahun 2013 hingga 2023 cenderung meningkat, hal ini dapat dikatakan bahwa selama periode tersebut Banten sudah mampu melaksanakan desentralisasi fiskalnya serta cukup mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun, jika dilihat kembali antara target dan realisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Banten beberapa tahun belakangan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Beberapa tahun terakhir PAD Provinsi Banten belum mencapai target pada tahun pada tahun 2019 target pendapatan asli daerah sebesar 7.344,82 miliar sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 7.022,31 miliar, tahun 2020 target pendapatan asli daerah sebesar 8.154,75 miliar sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 5.906,54 miliar, tahun 2021 target pendapatan asli daerah sebesar 7.247 miliar rupiah sedangkan realisasinya sebesar 7.010 miliar rupiah dan tahun 2023 target pendapatan asli daerah Provinsi Banten sebesar 8.877, 57 miliar sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 8.514,34 miliar.

Mengutip dari Radar Banten pada tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten mengalami defisit sebesar 68 miliar rupiah, hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya belanja daerah dibandingkan dengan penerimaan pendapatan (Radar Banten, 2023). Penyumbang penerimaan pendapatan daerah terbesar berasal dari pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak dapat bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, pendapatan asli daerah Provinsi Banten harus terus ditingkatkan agar dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan pada akhir tahun tidak khawatir mengalami defisit APBD. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa masih ada potensi bagi Provinsi Banten dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk meningkatkan kemandirian dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai dengan optimal.

Menurut beberapa kajian sebelumnya, Batik (2013) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama yang dinilai mempengaruhi besar kecilnya pendapatan asli daerah diantaranya adalah investasi dan jumlah penduduk. Investasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan dengan lancar maka pemerintah daerah menawarkan untuk membuka peluang investasi. Menurut Julfiansyah (2013) dalam pengembangan sumber daya daerah sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan daerah memerlukan dana sebagai modal atau investasi. Sumber investasi ini dapat berasal dari masyarakat maupun pemerintah, sumber investasi masyarakat juga tidak sebatas masyarakat dalam negeri saja, namun juga masyarakat luar negeri. Sumber investasi dari pemerintah pun juga tidak sebatas pemerintah dalam negeri saja, namun juga ada investasi yang berasal dari luar negeri. Masing-masing sumber investasi memiliki tujuan dan sasaran sendiri, baik investasi dari masyarakat atau pemerintah, maupun dari dalam negeri dan luar negeri.

Di Indonesia penanaman modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berikut ini merupakan perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Banten:

Tabel 1.1

Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Banten Tahun 2013-2023

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (dalam juta rupiah)	Penanaman Modal Asing (dalam ribu rupiah)
2013	4.008.861,80	60.914.723.452,20
2014	8.081.298,40	33.314.984.135,40
2015	10.709.896,40	41.622.192.219,00
2016	12.426.311,10	47.682.104.825,40
2017	15.141.904,70	49.899.265.593,00
2018	18.637.560,80	46.293.807.399,60
2019	20.708.396,90	30.589.554.759,00
2020	31.145.661,90	35.098.638.340,80
2021	25.989.489,50	35.858.522.932,80
2022	31.283.874,90	55.846.508.705,40
2023	37.971.670,60	72.890.277.351,00

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah penulis, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa penanaman modal asing pada tahun 2013 hingga 2023 cenderung mengalami fluktuasi. PMA terendah berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 30.589.554.759,00 rupiah penurunan ini mungkin disebabkan oleh adanya Pemilu dan Legislatif di Indonesia. Investor asing cenderung menerapkan strategi *wait and see* untuk menunggu kepastian politik dan arah kebijakan baru dari hasil pemilu, terutama menyangkut keberlanjutan proyek strategis nasional dan perizinan. Pada tahun 2020 sampai 2023 PMA mengalami peningkatan, tahun 2023 PMA meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 72.890.277.351,00 rupiah.

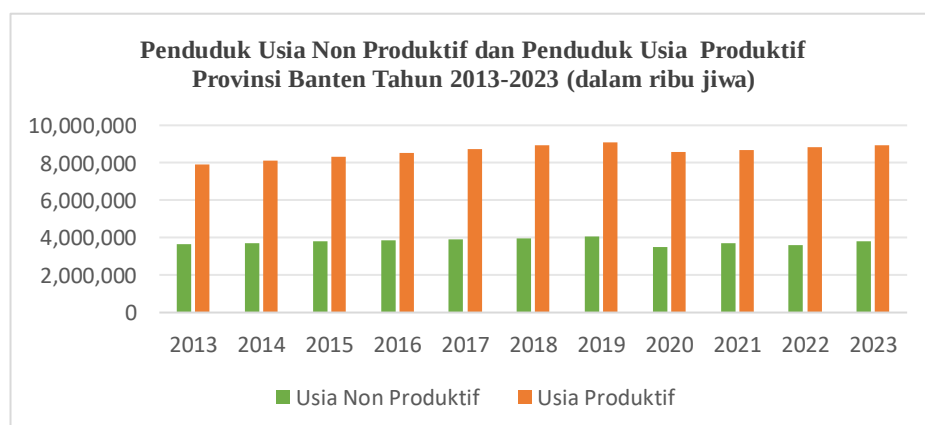
Sedangkan penanaman modal dalam negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Namun, Tahun 2021 penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan menjadi 25.989.489,50 rupiah, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan

investor domestik, sehingga banyak investor domestik yang memilih untuk menunda atau mengurangi investasi mereka sampai situasinya kembali stabil. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 PMDN mulai meningkat kembali.

Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung (2008:84) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh investasi, apabila investasi (penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri) dapat masuk kedalam suatu daerah, maka akan memberikan dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat terhadap daya beli meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah.

Investasi penanaman modal memiliki peran yang penting bagi kemajuan sebuah negara atau daerah, hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pendapatan. Adanya penanaman modal di suatu daerah akan berpotensi terhadap peningkatan pajak bagi daerah tersebut, selain itu, terdapat hasil retribusi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pendapatan asli daerah. Selain penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, penduduk usia produktif merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya pendapatan suatu daerah.

Berikut ini merupakan perkembangan penduduk usia produktif yang ada di Provinsi Banten dari tahun 2013 hingga 2023:



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah penulis, 2024)

Gambar 1.3

Penduduk Usia Produktif Provinsi Banten 2013 - 2023

Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Banten dari tahun 2013 hingga 2023 didominasi oleh penduduk yang memiliki usia produktif. Pada tahun 2023 penduduk yang memiliki usia produktif sebanyak 8.932.510 juta jiwa, sedangkan penduduk yang memiliki usia tidak produktif sebanyak 3.831.179 juta jiwa dan pada tahun 2023 jumlah penduduk usia produktif mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 8.814.370 juta jiwa menjadi 8.932510 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Henrikus Triyanto (2017) menjelaskan bahwa penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin produktif penduduk yang berada di daerah maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, namun harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang telah terdidik. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif ini menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, terutama jika didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja yang memadai.

Dengan demikian, semakin banyaknya penduduk yang berusia produktif maka pendapatan asli daerah akan meningkat dari penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah. Sehingga APBD disisi pendapatan daerah akan meningkat seiring dengan bertambahnya PAD yang diperoleh dari pajak maupun retribusi yang dibayarkan oleh penduduk. Dengan meningkatkan APBD disisi penerimaan pendapatan daerah maka dapat membiayai segala pengeluaran pemerintah seperti belanja operasi, belanja modal, ataupun belanja tak terduga. Apabila jumlah pendapatan daerah pada APBD lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja daerah maka akan mengakibatkan terjadinya surplus APBD.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh investasi penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penduduk usia produktif terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Hayati Lubis & Fitiani (2018) dan Defprin Sinaga & Noni Rozaini (2023) menunjukkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Demikian juga dengan penanaman modal dalam negeri, penelitian yang dilakukan oleh Rini Hayati Lubis & Fitiani (2018) dan Defprin Sinaga & Noni

Rozaini (2023) menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Henrikus Triyanto (2017) yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan Ni Putu Monika Pratiwi & Putu Ayu Pramitha Purwanti (2024) yang melakukan penelitian di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa penduduk usia produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda seperti penelitian milik Doni Julfiansyah (2013) menunjukkan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan, begitu pun dengan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Atep Trendi Rohman Hidayat (2020) menunjukkan bahwa penduduk usia produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi dalam dampak investasi penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penduduk usia produktif terhadap pendapatan asli daerah di berbagai wilayah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh sumber daya alam, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Investasi Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2013-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang melatar belakangi penelitian ini, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penduduk Usia Produktif di Provinsi Banten tahun 2013-2023?

2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penduduk Usia Produktif secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Banten tahun 2013-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penduduk Usia Produktif di Provinsi Banten tahun 2013-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penduduk Usia Produktif secara simultan maupun parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten tahun 2013-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti ini adalah:

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. Sedangkan dalam aplikasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai topik yang sesuai dengan judul diatas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pemerintah Provinsi Banten.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Banten dan menjadi bahan pertimbangan serta pengembangan kinerja lembaga agar tujuan dan target pemerintah dapat tercapai dengan baik.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten tahun 2013-2023 dengan memperoleh data-data yang diperlukan dari situs resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, dan DJPK Kemenkeu.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan September 2024 sampai bulan Juni 2025.